

BAB III
KERJASAMA KEPOLISIAN ASEAN DALAM PENANGANAN KASUS
PERDAGANGAN MANUSIA

3.1 Pertemuan Internasional

3.1.1 Forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*)

Pada awalnya kerjasama dalam rangka menanggulangi kasus kejahatan lintas negara di Asia Tenggara pertama kali dibahas dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN tahun 1997 di Manila dengan berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi yang disebut *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Pada forum ini negara sepakat untuk melakukan koordinasi dan kerjasama secara regional melalui sebuah forum yang dikenal dengan sebutan AMMTC. Berangkat dari sinilah AMMTC menjadi sebuah wadah yang memberikan fasilitas kepada para menteri di ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara.⁸³

AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) sendiri merupakan sebuah pertemuan setingkat menteri yang mana dalam pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai isu-isu kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara.⁸⁴ Disisi lain pertemuan ini menjadi salah satu upaya negara anggota ASEAN untuk menjalin kerjasama dalam menangani berbagai isu kejahatan transnasional/internasional dengan menghasilkan berbagai perjanjian-

⁸³ Muhammad Fahrian Yovantra, M. Afifuddin, dan Herlina J.R. Saragih, *Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC*, Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol, 4, No, 1 (2018), hal. 48.

⁸⁴ Sekretaris Nasional ASEAN-Indonesia, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, Website Resmi Setnas ASEAN-Indonesia, diakses dalam <https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc> (21/09/2023, 19:32 WIB)

perjanjian ataupun penandatanganan nota kesepahaman sebagai bukti tertulis dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan secara bersama.

Pertemuan forum AMMTC pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18-20 Desember 1997 yang bertempat di Manila, Filipina. Dalam pertemuan AMMTC yang pertama ini para perwakilan negara mengeluarkan deklarasi ASEAN tentang kejahatan transnasional (*transnational crime*). Dimana terbentuknya AMMTC bisa dikatakan merupakan mekanisme SOMTC sebagai subordinasinya.⁸⁵

Seperti pada penjelasan sebelumnya, pertemuan forum yang pertama kali diadakan fokus utama dari AMMTC Filipina ini lebih mengarah pada permasalahan kejahatan transnasional dalam aspek terorisme. Dimana hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti kasus yang sedang dihadapi guna menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sehingga negara anggota ASEAN sepakat untuk menjadikan AMMTC sebagai forum untuk menanggulangi kejahatan transnasional baik dalam bentuk terorisme maupun kejahatan yang lainnya.⁸⁶

Jika melihat pada Indonesia yang telah mengikuti pertemuan AMMTC sejak pertama kali diselenggarakan, pemerintah sepakat untuk menunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pimpinan AMMTC perwakilan Indonesia yang didalamnya dibantu oleh Kementerian/Badan/Instansi dengan memiliki kepentingan yang sama yaitu membantu pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional.⁸⁷ Dimana tujuan diberikannya amanah ini

⁸⁵ Dewa Gede Sudika and Ni Putu Rai Yuliantini, *Indonesia's Role in Combating Terrorism in Southeast Asia*, Unnes Law Journal, Vol, 7, No, 1 (2021), p. 105.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Delaila Fitriani Thifal, 2022, *Conference Diplomacy Pada Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Keterlibatan NCB-Interpol Indonesia dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational*

kepada Kapolri tidak lain dikarenakan tugas dan peran Polri yang tidak lepas dari penanganan kasus-kasus kejahatan yang ada. Disisi lain juga ini menjadi sebuah tugas besar bagi Polri yang tidak hanya menangani tindak kejahatan di dalam akan tetapi juga di luar selagi itu ada hubungannya dengan WNI.

Selain itu dalam kegiatan AMMTC sendiri, pertemuan yang dilakukan tidak hanya melibatkan kepolisian dari masing-masing negara ASEAN, akan tetapi juga mengundang perwakilan para menteri untuk turut bergabung dalam forum AMMTC. Dengan terlibatnya pihak-pihak tersebut nantinya para menteri maupun kepolisian negara anggota ASEAN akan berdiskusi terkait isu kejahatan transnasional. Dengan adanya hal ini tentu akan mempermudah komunikasi dan koordinasi bagi masing-masing perwakilan negara untuk memperkuat kerjasama yang akan dilakukan.

Disamping itu, dengan dilaksanakannya kerjasama ASEAN melalui forum AMMTC dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional ternyata forum ini melibatkan negara-negara yang berada di luar kawasan Asia Tenggara, dimana negara anggota sepakat mengusulkan peningkatan kerjasama dengan menambahkan 3 perwakilan dari negara diluar Asia Tenggara (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan) untuk turut bergabung dalam agenda pertemuan tahunan sejak tahun 2017 silam. Dengan demikian AMMTC diperluas menjadi AMMTC + 3 dengan harapan menjadi titik fokus dalam pertukaran informasi sekaligus berbagi keahlian secara teknis melalui pelatihan dan lokakarya.⁸⁸

Crime Ke-15 Tahun 2021), Skripsi, Jakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁸⁸ Muhammad Fahrian Yovantra, M. Afifuddin, dan Herlina J.R. Saragih, *Op. Cit.*

Oleh karena itu dengan diselenggarakannya AMMTC ini menjadi sebuah komitmen ASEAN untuk mengatasi berbagai kejahatan transnasional yang semakin marak keberadaannya. Melalui segala bentuk pencapaian yang telah diraih dengan diadakannya forum ini tidak akan lepas dari proses yang cukup panjang sejak diadakannya AMMTC pertama di Filipina sampai AMMTC ke-17 dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah. Melalui komitmen ASEAN tersebut penulis akan memperlihatkan negara mana saja yang pernah menjadi *chairmanship* atau ketua dalam penyelenggaraan forum internasional ini. Berikut datanya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 8. Keketuaan Forum AMMTC tahun 1997-2023

No	Pertemuan	Ketua	Tanggal dan Tempat Pelaksanaan
1.	Pertemuan Menteri Dalam Negeri/Dalam Negeri ASEAN mengenai Kejahatan Transnasional	Filipina	18-20 Desember 1997, Manila
2.	AMMTC ke-2	Myanmar	21-23 Juni 1999, Yangon
3.	AMMTC ke-3	Singapura	9-11 Oktober 2001, Singapura
4.	AMMTC ke-4	Thailand	7-10 Januari 2004, Bangkok
5.	AMMTC ke-5	Vietnam	28 November - 1 Desember 2005, Hanoi
6.	AMMTC ke-6	Brunei Darussalam	5-7 November 2007, Bandar Seri Begawan
7.	AMMTC ke-7	Kamboja	16-18 November 2009, Siem Reap

8.	AMMTC ke-8	Indonesia	10-12 Oktober 2011, Bali
9.	AMMTC ke-9	Laos	16-18 September 2013, Vientiane
10.	AMMTC ke-10	Malaysia	28-30 September 2015, Kuala Lumpur
11.	AMMTC ke-11	Filipina	18-21 September 2017, Manila
12.	AMMTC ke-12	Myanmar	29 Oktober - 1 November 2018, Nay Pyi Taw
13.	AMMTC ke-13	Thailand	26-28 November 2019, Bangkok
14.	AMMTC ke-14	Vietnam	24-26 November 2020 Secara daring
<i>Sejak 1 Januari 2021, keketuaan AMMTC mengikuti pada keketuaan ASEAN</i>			
15.	AMMTC ke-15	Brunei Darussalam	28-30 September 2021 Secara daring
16.	AMMTC ke-16	Kamboja	20-22 September 2022 Secara daring
17.	AMMTC ke-17	Indonesia	20-22 Agustus 2023, Labuan Bajo, Indonesia

Sumber: Website Resmi The ASEAN Secretariat⁸⁹

⁸⁹ The ASEAN Secretariat, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, diakses dalam <https://asean.org/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc/> (23/09/2023, 20:45 WIB)

3.1.2 Forum SOMTC (*Senior Officials Meeting on Transnational Crime*)

Selain AMMTC, ASEAN juga memiliki forum pertemuan lain yang dikenal dengan sebutan SOMTC (*Senior Officials Meeting on Transnational Crime*). SOMTC merupakan forum kerjasama antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dalam memerangi kejahatan transnasional.⁹⁰ Dengan kata lain SOMTC ini mendorong untuk diterapkannya deklarasi ASEAN tentang kejahatan transnasional, rencana aksi ASEAN untuk mengatasi kejahatan tersebut, serta program kerja untuk melaksanakan rencana aksi ASEAN yang telah disusun dan disepakati bersama.⁹¹

Seperti halnya pada forum AMMTC yang memiliki mekanisme dialog AMMTC + 3 dengan melibatkan tiga negara di luar Asia Tenggara (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan), pada forum SOMTC juga memiliki mekanisme diskusi yang dikenal dengan SOMTC + *Dialogue Partner Consultation* yang mana nantinya setiap perwakilan polisi atau pihak dari masing-masing negara ASEAN akan melakukan dialog dengan negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tidak hanya itu sesi dialog juga akan dilakukan bersama negara lainnya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Rusia, Australia, Kanada, serta Selandia Baru.⁹² Itu artinya jangkauan diskusi dari forum SOMTC lebih luas dibandingkan dengan AMMTC.

⁹⁰ Dewa Gede Sudika and Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit.*, p. 103.

⁹¹ ILO, *Regional Conference on the Labour Dimensions of Trafficking*, Website Resmi Internasional Labour Organization, diakses dalam https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_338863/lang--en/index.htm (23/09/2023, 21:38 WIB)

⁹² Nur S Qalbi, Fitrah Marinda, dan Rina Yulianti, *ASEAN Against Cyber Terrorism: Upaya Mengatasi Propaganda Hitam sebagai Kejahatan Siber Terorganisir*, Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif), Vol, 4, No, 1 (2020), hal. 113-114.

Dalam pertemuannya, negara-negara yang terlibat dalam forum SOMTC akan melakukan diskusi terkait dengan permasalahan kejahatan yang terjadi dengan menghasilkan beberapa deklarasi. Dimana deklarasi tersebut berisi kebijakan-kebijakan dengan syarat negara anggota ASEAN harus mampu menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Adapun deklarasi yang dimaksud meliputi:⁹³

- a. Meningkatkan kampanye melalui berbagai media massa, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat baik lokal maupun internasional yang nantinya akan menumbuhkan kesadaran dan memberikan pembelajaran perihal permasalahan tindakan perdagangan manusia sebagai aksi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
- b. Melanjutkan pembangunan terutama terhadap kualitas penegak hukum, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, lembaga imigrasi, maupun pejabat dan tenaga kerja sebagai langkah dari pemerintah guna melakukan pencegahan terhadap kasus kejahatan transnasional yang akan menghasilkan kerjasama dan dukungan antara masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat.
- c. Menerapkan konsep atau mekanisme kerjasama yang efektif sehingga dengan cepat dapat mencegah pergerakan dari pelaku kejahatan transnasional. Adapun mekanisme yang dilakukan yaitu dengan cara melaksanakan pengontrolan di berbagai wilayah perbatasan dan menerbitkan surat-surat yang ada hubungannya dengan identitas diri

⁹³ Fina Faizani, *Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Human Trafficking di Asia Tenggara*, Working Paper, 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

ataupun dokumen perjalanan. Sehingga dengan dilakukannya mekanisme tersebut akan meminimalisir adanya tindakan pemalsuan maupun penipuan penggunaan identitas dan juga dokumen perjalanan.

- d. Setiap negara anggota ASEAN ditekan untuk mengadopsi dan menerapkan peraturan terkait ketenagakerjaan yang efektif serta melindungi kepentingan dan hak pekerja sehingga akan mengurangi risiko kejahatan terutama perdagangan manusia.
- e. Mengadopsi dan memastikan adanya implementasi rencana aksi dari setiap negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengutamakan kebijakan/program yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.
- f. Memperkuat upaya-upaya yang telah ditetapkan guna mencegah potensi-potensi lahirnya tindakan eksploitasi terhadap manusia.

Dari poin-poin deklarasi yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menjadi sebuah patokan bagi ASEAN untuk mencapai target dalam penanganan kasus kejahatan transnasional terlebih tindakan perdagangan manusia. Oleh karena itu komitmen ASEAN dengan melibatkan kepolisian negara beserta pihak lain sangat diperlukan guna menangani kasus yang ada. Berbicara mengenai hal tersebut penulis akan menyajikan tabel *chairmanship* dari penyelenggaraan SOMTC sebagai bentuk komitmen dari ASEAN dan negara anggotanya.

Tabel 9. Keketuaan Forum SOMTC tahun 2001-2023

No	Pertemuan	Ketua	Tanggal dan Tempat Pelaksanaan
1.	Pertemuan Pejabat Senior ASEAN Pertama tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC)	Thailand	28-30 Maret 2001, Bangkok
2.	SOMTC ke-2	Malaysia	16-17 Mei 2002, Kuala Lumpur
3.	SOMTC ke-3	Vietnam	9-10 Juni 2003, Hanoi
4.	SOMTC ke-4	Brunei Darussalam	26-29 September 2004, Bandar Seri Begawan
5.	SOMTC ke-5	Kamboja	13-17 Juni 2005, Siem Reap
6.	SOMTC ke-6	Indonesia	6-9 Juni 2006, Bali
7.	SOMTC ke-7	Laos	25-28 Juni 2007, Vientiane
8.	SOMTC ke-8	Malaysia	16-19 Juni 2008, Kuala Lumpur
9.	SOMTC ke-9	Myanmar	30 Jun - 3 Juli 2009, Nay Pyi Taw
10.	SOMTC ke-10	Filipina	25-28 Oktober 2010, Manila
11.	SOMTC ke-11	Singapura	25-28 Juli 2011, Singapura
12.	SOMTC ke-12	Thailand	17-20 September 2012, Bangkok
13.	SOMTC ke-13	Vietnam	18-21 Juni 2013, Da Nang

14.	SOMTC ke-14	Brunei Darussalam	23-26 Juni 2014, Bandar Seri Begawan
15.	SOMTC ke-15	Kamboja	8-11 Juni 2015, Siem Reap
16.	SOMTC ke-16	Indonesia	23-26 Mei 2016, Jakarta
17.	SOMTC ke-17	Laos	23-26 Mei 2017, Vientiane
18.	SOMTC ke-18	Malaysia	24-27 September 2018, Putrajaya
19.	SOMTC ke-19	Myanmar	23-26 Juli 2019, Nay Pyi Taw
20.	SOMTC ke-20	Filipina	24 September 2020, Secara daring
<i>Sejak 1 Januari 2021, keketuaan SOMTC mengikuti pada keketuaan ASEAN</i>			
21.	SOMTC ke-21	Brunei Darussalam	27-29 Juli 2021, Secara daring
22.	SOMTC ke-22	Kamboja	19-21 Juli 2022, Secara daring
23.	SOMTC ke-23	Indonesia	20-23 Juni 2023, Yogyakarta, Indonesia

Sumber: Website Resmi The ASEAN Secretariat⁹⁴

3.1.3 Hasil dari Forum AMMTC dan SOMTC

Sebagai forum yang sama-sama membahas mengenai tindakan kejahatan transnasional, pelaksanaan AMMTC dan SOMTC harus dilakukan setiap tahunnya.

⁹⁴ The ASEAN Secretariat, *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, diakses dalam <https://asean.org/senior-officials-meeting-on-transnational-crime-somtc/> (23/09/2023, 22:38 WIB)

Hal ini dikarenakan kedua pertemuan internasional tersebut yang akan menjadi momen yang tepat untuk negara-negara berkomunikasi secara langsung dalam membuat strategi guna menangani kejahatan yang ada.

Meskipun keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing, namun antara AMMTC dan SOMTC saling berkaitan antara satu sama lain. Dengan adanya SOMTC, forum ini yang ibaratnya akan membuka jalan untuk dilaksanakannya AMMTC. Karena kembali lagi segala sesuatu yang dibahas dalam AMMTC tidak akan lepas dari pembahasan di forum SOMTC sebelumnya. Dengan demikian apabila nantinya terdapat diskusi atau pembahasan terkait kerjasama yang belum sempat diselesaikan dalam forum SOMTC, maka hal tersebut akan dibahas dalam forum lanjutan yaitu AMMTC. Dengan kata lain pada pertemuan AMMTC segala bentuk diskusi/dialog, perjanjian kerjasama atau MoU, dan lain sebagainya secara tidak langsung akan disepakati pada forum tersebut sebagai forum penutup dari pertemuan internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEANAPOL. Berikut di bawah ini adalah hasil penandatanganan MoU antara Polri dengan pihak negara-negara anggota ASEANAPOL.

Tabel 10. Nota Kesepahaman (MoU) terbaru dari kerjasama Polri dengan Kepolisian negara ASEAN

No	Negara	Nama Dokumen	Pihak yang Terlibat	Keterangan
1.	Lao PDR	MoU Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan	Polri dan Kementerian Keamanan Publik Republik Demokratik Rakyat Laos	Berlaku

		Kementerian Keamanan Publik Laos		
2.	Singapura	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Singapura	Polri dan Kepolisian Singapura (SPF)	Berlaku
3.	Thailand	MoU Pencegahan, Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Kerajaan Thailand Kerajaan Thailand	Polri dan Polisi Kerajaan Thailand	Berlaku
4.	Vietnam	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam	Polri dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam	Berlaku
5.	Kamboja	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja	Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja	Berlaku
6.	Malaysia	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Kapasitas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia	Polri dan Polisi Kerajaan Malaysia	Berlaku

Sumber: Laporan Data Bagjatinter Polri⁹⁵

Selain keenam rekapan MoU di atas, sebelumnya Indonesia juga pernah menjalin kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN yang dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna penanganan kasus kejahatan transnasional. Adapun datanya sebagai berikut.

Tabel 11. Rekapan data (MoU) kerjasama Polri

No	Negara	Nama Dokumen	Pihak yang Terlibat	Keterangan
1.	Brunei Darussalam	MoU Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Kerajaan Brunei	Polri dan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam	Masih Berlaku
2.	Lao PDR	MoU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Pengembangan Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Laos	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pemerintah Lao PDR	Sedang Perpanjangan
3.	Malaysia	MoU tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Bahan Berbahaya dan Peningkatan Kerjasama Kepolisian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia	Polri dan Pemerintah Malaysia	Masih Berlaku

⁹⁵ Laporan data Bagian Kejahatan Internasional Set-NCB Interpol Indonesia, Jakarta Selatan, 13 September 2023.

4.	Filipina	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Filipina	Polri dan Pemerintah Filipina	Masih Berlaku
5.	Timor Leste	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Pengembangan Kolaborasi Kepolisian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Timor Leste	Polri dan Kepolisian Timor Leste	Masih Berlaku
6.	Timor Leste	Pengaturan Teknis antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Timor Leste tentang Peningkatan Kapasitas	Polri dan Kepolisian Timor Leste	Masih Berlaku
7.	Myanmar	MoU Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional serta Peningkatan Kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Myanmar	Polri dan Kepolisian Myanmar	Dalam Pembuatan

Sumber: Laporan Data Bagjatinter Polri⁹⁶

3.2 Pengiriman Personel ke Luar Negeri

Pada dasarnya pengiriman personel Polri ke luar negeri sangat akan membantu tugas polisi yang berada di dalam untuk bisa melakukan penanganan terkait kasus yang ada. Dimana keberadaan personel polisi yang ditempatkan di luar

⁹⁶ Laporan data Bagian Kejahatan Internasional Set-NCB Interpol Indonesia, Jakarta Selatan, 13 September 2023.

negeri akan menjadi jembatan koordinasi sehingga kasus kejahatan misalnya perdagangan manusia yang melibatkan WNI akan lebih mudah ditangani karena adanya keberadaan personel di negara terkait. Adapun personel yang ditugaskan di luar yang dalam hal ini menetap di negara lain dikenal dengan sebutan Atpol (Atase Polri) dan/atau Stafnispol (Staf Teknis Polri).

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Atase dan Staf Teknis Polri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disebutkan dalam Pasal 1 bahwasanya Atpol merupakan pejabat Polri yang bertugas pada Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sedangkan Stafnispol adalah pejabat Polri yang ditempatkan pada Perwakilan Konsuler Republik Indonesia di luar negeri.⁹⁷

Penugasan personel-personel tersebut (Atpol dan Stafnispol) di luar negeri harus disesuaikan dengan kuantitas WNI di negara terkait. Dengan kata lain apabila di suatu negara keberadaan WNI cukup banyak, maka bisa dilakukan pengiriman personel ke negara terkait dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri karena pada dasarnya personel yang dikirim nantinya akan bernaung di KBRI/KJRI. Hal inilah yang dikatakan oleh AKBP Widho saat dilakukannya wawancara secara langsung.

Adapun tujuan dari penempatan personel di luar negeri adalah sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempererat kerjasama dalam penanganan kejahatan transnasional, penegakan hukum, peningkatan kapasitas Polri, serta

⁹⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Atase dan Staff Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, hal. 2.

memberikan perlindungan terhadap WNI dengan semangat kebersamaan melalui kepentingan yang dibangun atas prinsip persamaan dan saling menghormati. Meskipun ditugaskan pada tempat yang berbeda, antara Atpol dan Stafnispol ini sama-sama Perwira Penghubung Polri (LO) yang akan melaksanakan koordinasi untuk berkomunikasi dalam menjalankan kegiatan bersama sesuai dengan kepentingan tugas kepolisian.⁹⁸

Dalam menunjang koordinasi antara personel Polri baik yang berada di dalam maupun luar negeri, hingga ada ini kurang lebih ada 11 (sebelas) Atpol dan 6 (enam) Stafnispol yang tersebar di berbagai negara. Adapun para personel Polri yang menjadi Atpol dan Stafnispol adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Atpol dan Stafnispol Polri

No	Nama	Jabatan	Penempatan
1	Brigjen Pol. Oktavianus Marthin, S.I.K.	Atase Polri	KBRI Washington, Amerika Serikat
2	Brigjen Pol. Tommy Aria Dwianto, S.I.K.	Atase Polri	KBRI Canberra, Australia
3	Kombes Pol. Fibri Karpiananto, S.H., S.I.K.	Atase Polri	KBRI Den Haag, Belanda
4	Kombes Pol. Erick Hermawan, S.I.K., M.H.	Atase Polri	KBRI Riyadh, Saudi Arabia
5	Kombes Pol. Gaspar Mikel B.L.P Da Costa, S.H., Dipl. Tr.	Atase Polri	KBRI Dili, Timor Leste
6	Kombes Pol. Harviadhi Agung Prathama, S.I.K., M.I.K.	Atase Polri	KBRI Ankara, Turki
7	Kombes Pol. Shinto Bina Gunawan Silitonga, S.I.K., M.Si.	Atase Polri	KBRI Berlin, Jerman

⁹⁸ Alex Willem Tlonaen, Asropi, dan Bambang Giyanto, *Strategi Meningkatkan Peran Kepolisian dalam Kerjasama Internasional: Studi Pada Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia*, International Journal of Demos, Vol, 4, No, 3 (2022), hal. 1149.

8	Kombes Pol. Juliarman Eka Putra Pasaribu, S.Sos., S.I.K., M.Si.	Atase Polri	KBRI Kuala Lumpur, Malaysia
9	Kombes Pol. Retno Prihawati, S.Sos., S.I.K., M.H.	Atase Polri	KBRI Manila, Filipina
10	Kombes Pol. Indra Fadhillah Siregar, S.H., S.I.K., M.H.	Atase Polri	KBRI Singapura
11	Kombes Pol. Endon Nurcahyo, S.I.K.	Atase Polri	KBRI Bangkok, Thailand
12	AKBP. Agus Siswanto, S.H. AKBP. Mulyawaty Syam, S.I.K., M.M.	Staf Teknis Polri	KJRI Tawao, Sabah Malaysia
13	AKBP. Sofyan Arief, S.I.K.	Staf Teknis Polri	KJRI Penang, Malaysia
14	AKBP. M. Sandhi Satyatama, S.H., S.I.K., M.SC.S.	Staf Teknis Polri	KJRI Kuching, Malaysia
15	AKBP. Yunik Dwi Astuti MW, S.I.K., M.Si.	Staf Teknis Polri	KJRI Johor Bahru, Malaysia
16	AKBP. Alex Willem Tlonaen, S.T., M.M., M.Tr.A.P.	Staf Teknis Polri	KJRI Davao City, Filipina
17	Kompol. Agung Wahyudi, S.H., M.H.	Staf Teknis Polri	KJRI Hongkong

Sumber: Laporan Data Bagrenmin⁹⁹ dan Majalah Divhubinter Polri¹⁰⁰

3.3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personel

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam point 2.2 bab II terkait dengan peran Polri dalam penanganan kasus perdagangan manusia bahwasanya dalam meminimalisir kasus yang ada, kerjasama guna meningkatkan kapasitas sumber

⁹⁹ Laporan Data Bagian Perencanaan dan Administrasi Divisi Hubungan Internasional Polri, Jakarta Selatan, 24 Desember 2023.

¹⁰⁰ Divisi Hubungan Internasional Polri: *Majalah Divhubinter Polri Edisi ke-16*, hal. 101.

daya manusia bagi personel Polri sangat perlu dilakukan, dimana hal ini nantinya akan menciptakan personel yang lebih unggul dan berkualitas.

Melalui upaya preemtif (pencegahan), kerjasama dengan dilakukannya pelatihan gabungan antara Polri dengan pihak kepolisian luar negeri menjadi strategi dalam pencegahan tindak kejahatan transnasional termasuk aksi perdagangan manusia. Dilansir dari laporan Bagian Perencanaan dan Administrasi (renmin), guna meningkatkan kemampuan sumber daya anggotanya (*capacity building*) Polri melalui Divisi Hubungan Internasional Polri telah melakukan kerjasama dengan negara-negara sahabat baik dalam bidang pendidikan maupun pelatihan guna membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang mendukung peningkatan SDM.¹⁰¹

Disamping itu, menurut pasal 30 UUD Tahun 1945 perihal pembangunan sumber daya manusia yang unggul pada instansi kepolisian, Polri sendiri telah siap menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mendorong transformasi Polri yang presisi dan unggul di era Police 4.0.¹⁰² Sehingga dari hal ini dengan upaya tersebut pihak kepolisian terutama Polri akan lebih siap dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional yang ada. Adapun kegiatan yang pernah dilaksanakan diantaranya:

¹⁰¹ Laporan Bagian Perencanaan dan Administrasi Divisi Hubungan Internasional Polri, Jakarta Selatan, 21 Maret 2024.

¹⁰² Junus Siamangunsong, *Peningkatan Perilaku Kebangsaan Melalui Pembinaan dan Pelatihan Bintara Remaja Kepolisian Daerah Papua Barat*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol, 22, No, 1 (2022), hal. 60.

a. Kerjasama Polri dengan Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam kerjasama ini Polri menjadi tuan rumah dalam pelatihan internasional tersertifikasi guna pengiriman pasukan perdamaian serta pengembangan kapasitas personel di Asia. Kegiatan pelatihan tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan *Police Mentoring and Advising* yang bertempat di Pusat Misi Internasional Polri ini dilaksanakan selama tiga minggu dengan diikuti oleh kurang lebih sebanyak 25 peserta yang berasal dari beberapa negara seperti Banglades, Korea Selatan, Vietnam, Mongolia, Thailand, dan lain sebagainya.¹⁰³

b. ASEANAPOL Training Cooperation Meeting (ATCM)

Kegiatan ATCM ini sendiri merupakan pertemuan antar kepolisian negara anggota ASEAN dalam bertukar pengalaman, praktik penanganan kejahatan, dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas personel kepolisian. Dimana dalam pelatihan ini sekretariat ASEANAPOL akan memberikan informasi terkait kerjasama pelatihan termasuk didalamnya usulan rencana dan resolusi.¹⁰⁴ Sehingga dari pelatihan ini akan melahirkan sumber daya personel yang siap turun ke lapangan untuk menangani segala bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di Asia Tenggara.

¹⁰³ Laily Rahmawaty, *Polri Tuan Rumah Pelatihan Internasional Kepolisian Bangsa-Bangsa*, 2022, diakses dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3272889/polri-tuan-rumah-pelatihan-internasional-kepolisian-bangsa-bangsa> (21/03/2024, 11:55 WIB)

¹⁰⁴ Muhammad Anas, *The 11th ASEANAPOL Training Cooperation Meeting (ATCM)*, diakses dalam [http://www.aseanapol.org/display/2023/06/02/the-11th-aseanapol-traning-cooperation-meeting-\(atcm\)-on-22nd---23rd-march-2023-phnom-penh-cambodia](http://www.aseanapol.org/display/2023/06/02/the-11th-aseanapol-traning-cooperation-meeting-(atcm)-on-22nd---23rd-march-2023-phnom-penh-cambodia) (21/03/2024, 13:35 WIB)

c. Pelatihan Polisi Internasional

Pelatihan yang satu ini merupakan salah satu upaya Polri dalam mempersiapkan personelnya untuk siap terjun ke misi perdamaian. Pelatihan yang dilaksanakan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) ini tidak hanya melibatkan personel polri saja namun juga anggota polisi dari negara-negara Afrika, Asia, dan Pasifik Oceania.¹⁰⁵ Sehingga demikian, dengan dilaksanakannya pelatihan gabungan personel kepolisian menjadi kontribusi nyata bagi Indonesia maupun negara luar untuk terus menjalin kerjasama dalam menangani permasalahan kejahatan maupun menjaga perdamaian dunia.

3.4 Pembiayaan Kerjasama

Dalam menjalin suatu kerjasama tentu membutuhkan yang namanya biaya agar kerjasama tersebut dapat terlaksana. Melalui peran Polri yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perdagangan manusia terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana tersebut, secara tidak langsung Polri memerlukan biaya misalnya pada pembiayaan administrasi dan transportasi personel yang akan melakukan evakuasi terhadap korban yang berada di luar, pembiayaan personel yang bertugas di luar negeri, pembekalan Atpol dan Stafnispol, kelompok kerja (pokja) penyusunan naskah perjanjian internasional, biaya pertemuan internasional dan lain sebagainya.¹⁰⁶ Jika segala kebutuhan personel dapat terpenuhi maka

¹⁰⁵ Stefani Wijaya, *Mabes Polri Gelar Pelatihan ke Polisi Internasional untuk Jaga Perdamaian*, 2023, diakses dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/1049434/mabes-polri-gelar-pelatihan-ke-polisi-internasional-untuk-jaga-perdamaian> (23/03/2024, 12:05 WIB)

¹⁰⁶ Laporan Data Bagian Perencanaan dan Administrasi Divisi Hubungan Internasional Polri, Jakarta Selatan, 14 September 2023.

kerjasama akan terjalin. Sehingga dengan ini pembiayaan sangat akan menunjang dalam menangani kasus kejahatan yang ada.

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang terhadap pemulangan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia, Polri terus berupaya untuk terlibat dalam menjaga HAM korban serta menjaga kawasan melalui kerjasama dengan pihak luar. Dalam menjalankan tugasnya, dukungan anggaran sangat dibutuhkan, terlebih permasalahan ini berada di luar negeri sehingga diperlukan biaya guna menunjang kinerja dari personel Polri tersebut. Dimana anggaran dana yang didapatkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahunnya. Adapun anggaran yang diberikan kepada Instansi Polri akan dialokasikan kepada beberapa divisi serta instansi kepolisian yang berada di daerah-daerah.

Berikut ini anggaran yang didapatkan Polri dari APBN sesuai dengan laporan Kementerian Keuangan RI sejak tahun 2020-2023 adalah dibawah ini.

Tabel 13. Anggaran Polri Tahun 2020

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran
1	Kementerian Pertahanan	Rp. 131,2 T
2	Kementerian PUPR	Rp. 120,2 T
3	Polri	Rp. 104,7 T
4	Kementerian Agama	Rp. 65,1 T
5	Kementerian Sosial	Rp. 62,8 T

Sumber: Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹⁰⁷

Tabel 14. Anggaran Polri Tahun 2021

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran
1	Kementerian PUPR	Rp. 149,8 T
2	Kementerian Pertahanan	Rp. 137,3 T
3	Polri	Rp. 112,1 T
4	Kementerian Sosial	Rp. 92,8 T
5	Kementerian Kesehatan	Rp. 84,3 T

Sumber: Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹⁰⁸

Tabel 15. Anggaran Polri Tahun 2022

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran
1	Kementerian Pertahanan	Rp. 134,7 T
2	Polri	Rp. 111,0 T
3	Kementerian PUPR	Rp. 100,6 T
4	Kementerian Kesehatan	Rp. 96,9 T
5	Kementerian Sosial	Rp. 78,3 T

Sumber: Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹⁰⁹

Tabel 16. Anggaran Polri Tahun 2023

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran
1	Kementerian Pertahanan	Rp. 134,3 T
2	Kementerian PUPR	Rp. 125,2 T
3	Polri	Rp. 111,1 T

¹⁰⁷ Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020, *Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, (2020) hal. 19

¹⁰⁸ Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021, *Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*, (2021) hal. 19

¹⁰⁹ Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2022, *Informasi APBN 2022: Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*, (2022) hal. 20

4	Kementerian Kesehatan	Rp. 85,5 T
5	Kemendikbud Ristek	Rp. 80,2 T

Sumber: Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹¹⁰

Data pada tabel di atas merupakan data kementerian/lembaga dengan anggaran belanja tertinggi di Indonesia tahun 2020-2023. Dimana jika melihat pada Polri, instansi tersebut masuk dalam jajaran tiga besar anggaran tertinggi sebesar lebih dari Rp. 100 Triliun per tahun. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan keperluan instansi baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anggaran Polri yang diberikan nantinya akan dialokasikan ke beberapa divisi yang berada di pusat salah satunya yaitu Divisi Hubungan Internasional Polri. Sebagai divisi yang menaungi personel dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan dunia internasional, Divhubinter Polri tidak hanya mengalokasikan anggarannya kepada kegiatan yang berada di dalam namun juga yang di luar negeri.

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas penanganan kejahatan internasional, Polri terus berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada seperti halnya pada anggaran pembekalan Atpol dan Stafnispol, pembiayaan administrasi dan transportasi bagi personel yang berdinasi di luar negeri, pembiayaan pokja penyusunan naskah perjanjian internasional, biaya pertemuan internasional, serta pengeluaran-pengeluaran kegiatan lainnya.

¹¹⁰ Laporan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023, *Informasi APBN 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*, (2023) hal. 21

Dengan demikian, anggaran menjadi salah satu penunjang dari penanganan kasus perdagangan manusia yang ada. Karena sejatinya percuma jika adanya koordinasi/komunikasi yang dilakukan antar pihak yang menjalin kerjasama akan tetapi tidak adanya pembiayaan/anggaran yang dibutuhkan, maka kerjasama yang terjalin hanyalah sebatas koordinasi saja tanpa adanya aksi.

